

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/rBVNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kuantitatif+kualitatif+dan+r%26d+sugiyono&printsec=frontcover
- S Nasution. (1995). *Metode research (penelitian ilmiah) usul tesis, desain penelitian, hipotesis, validitas, sampling, populasi, observasi, wawancara, angket*. Bumi Aksara.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

2. Jurnal dan Sumber Lainnya

- BMN. (2016). *Selayang Pandang BMN*. Bmn.Unej.Ac.Id. <https://bmn.unej.ac.id/?p=133>
- Direktorat Jenderal Keuangan Negara. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan BMN: Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara. *Media Kekayaan Negara*, 27.
- Dito et al. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- DJPb RI. (2021). *Profil - KPPN Padang Sidempuan| Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - DJPb Kemenkeu RI*. <Http://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>. <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/padangsidempuan/id/profil/sejarah/114-profil.html>
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Fitri, R. L., & Doni Triono, S. E. (2020). ANALISIS OPTIMALISASI EKS BMN IDLE (Studi Kasus Eks BMN Idle Berupa Tanah Dan Bangunan Rumah Negara Golongan II di Jl. Letjend Suprpto No. 31 Jember). *Indonesian Rich Journal*, 1(1), 15–29.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Humas DJKN. (2020). *Respon Dampak Pandemi Covid-19, DJKN Sederhanakan Proses Bisnis dan Sesuaikan Tarif Pemanfaatan BMN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21833/Respon-Dampak-Pandemi-Covid-19-DJKN-Sederhanakan-Proses-Bisnis-dan-Sesuaikan-Tarif-Pemanfaatan-BMN.html>
- Innes et al. (2020). Petunjuk Teknis Pengelolaan BMN. *Puskeshaji.Kemkes.Go.Id/*, 1–15.
- Jannah, N. L. (2019). *Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Sewa Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember*. LAKIN 2020. (2020).

- <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. (2021). 2020, 1–370. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/336019/setahun-pandemi-pernikahan-usia-dini-di-ngawi-terus-mengalami-kenaikan>
- Makki, S. (2020). *Sri Mulyani Maksimalkan BMN untuk Tangani Pandemi Corona*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200922123817-532-549354/sri-mulyani-maksimalkan-bmn-untuk-tangani-pandemi-corona>
- Nurani, A. S., Zauhar, S., & Saleh, C. (2015). Responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam perspektif new public service. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 18(4).
- PAEKSA, U. (2020). *ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PT. BANDAR KAYANGAN INTERNASIONAL*. Universitas Mataram.
- Pardiman dan Muh. Ulin Nuha. (2009). Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Modul 17. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/PENATAAN-PENGLOLAAN-BARANG-MILIK-NEGARA-BMN.html>
- Parera, S. A. (2014). Peran komunikasi organisasi dalam pelayanan publik di pt. taspen (persero) cabang Manado. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 3(3).
- Permana, Y. (2018). *PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM BENTUK SEWA*.
- Poma, M. D. (2016). Responsivitas Aparat dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 34–42.
- Pratiwi Bernadetta et al. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas*. https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Tindakan_Kelas/LCQ5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Puspasari, R. (2020). *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>
- Putri, F. S. (2020). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET NEGARA UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya)*. STIESIA SURABAYA.
- Ratna. (2017). *Studi Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Bmn) Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan*. 5, 5909–5921.
- Resia, E. (2020). *DJKN Respon Dampak Pandemi Covid-19 Dengan Relaksasi Pemanfaatan BMN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13415/DJKN-Respon-Dampak-Pandemi-Covid-19-Dengan-Relaksasi-Pemanfaatan-BMN.html>
- Risma, A. (2017). *PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA IDLE DALAM*

BENTUK SEWA MENYEWAWA SEBAGAI UPAYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK THE UTILIZATION OF THE STATE IDLE PROPERTIES IN THE LEASING FORM AS A NON TAX REVENUE.

- Seksi HI KPKNL Pamekasan. (2020). *Kebijakan Pemanfaatan BMN di Masa Pandemi Covid-19*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpamekasan/baca-berita/22350/Kebijakan-Pemanfaatan-BMN-di-Masa-Pandemi-Covid-19.html>
- Setyaningsih, P. (2021). *Barang Milik Negara: "Tolong Peliharalah Aku!"* Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Utama, I. P. (2015). *ANALISIS MODEL PENILAIAN PROPERTI PADA PENGELOLAAN ASET DALAM RANGKA SEWA BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus Pada Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara di KPKNL Bandung)* (p. 8).
- WHO. (2020). *Coronavirus*. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
- Wijaksono, R. T. (2019). Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Studi Kasus di Polresta Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 210206.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara